

# **LAPORAN TUGAS AKHIR**

## **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANJARMASIN**



Disusun oleh :

**INDRA PRATAMA  
1700312310022**

**PROGRAM STUDI DIII  
PERPAJAKAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT BANJARMASIN**

**2022**

**DISETUJUI DAN DITERIMA**  
**UNTUK DIAJUKAN PADA UJIAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Judul : TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
KOTA BANJARMASIN  
Daerah Kota Banjarmasin 2022**

**Nama : INDRA PRATAMA**

**NIM : 1700312310022**

**Program studi : D3.Perpajakan**

**Banjarmasin 04 juli 2022**

**Dosen pembimbing,**

**Kordinator Ketua Program  
Studi Diploma III Perpajakan**



**FATIMAH, SE, M.Si, Ak, CA**

**NIP.1996605041994032001**

**Hamdani SE, M.Si, Ak, CA**

**NIP.19670624 199403 1 004**

**LEMBAR PENGESAHAN TELAH DIAJUKAN PADA UJIAN  
LAPORAN TUGAS AKHIR**

---



**Judul** : Tata Cara Perhitungan Dan Pemotongan Pajak  
Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Penghasilan  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan  
Pengawas Obat Dan Makanan Kota Banjarmasin

**Nama** : Indra Pratama

**Nim** : 1700312310022

**Program Studi** : Diploma III perpajakan

**TIM PENGUJI :**

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Fatimah SE. M. Si. Ak. CA	 (.....)
2.	Hamdani SE, M. Si. Ak. CA	 (.....)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANJARMASIN selesai dengan tepat waktu. Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H Atma Hayat, Drs ,M. M.Si, Ak, CA, selaku dekan fakultas ekonomi bisnis universitas lambung mangkurat
2. Bapak Dr. Sarwani, Drs, Ak, M.Si, CA ketua program dIII fakultas ekonomi dan bisnis
3. Bapak Hamdani, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua program studi perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis
4. Ibu Fatimah,SE, M.Si, Ak, CA.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf yang telah berjasa memberikan bimbingan serta bekal Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
6. Kedua Orang Tua terima kasih yang telah memberikan semangat dan doa selama ini dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan. Akhir kata dari semua pihak yang telah membantu penulisan tugas akhir ini mendapat ganjaran yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna lainnya.

Banjarmasin, 20 Juni, 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indra Pratama', written in a cursive style.

Indra Pratama

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin.

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka diperoleh di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin, berupa daftar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan bukti potong pph pasal 21.

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. PTKP 2022 masih didasarkan pada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Mereka yang berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan atau kurang dari jumlah itu, tidak diwajibkan membayar pajak dan apabila berpenghasilan lebih dari itu maka di kenakan pajak pph 21, Atau Mereka yang berpenghasilan Rp54 juta pertahun atau kurang dari jumlah itu, tidak diwajibkan membayar pajak dan apabila berpenghasilan lebih dari itu maka di kenakan pajak pph 21. Banyak kendala yang di hadapi. Bendaharawan Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain : Jumlah pegawai yang banyak, Kadang juga sering bertemu selisih dalam membuat pembukuan dengan kata lain tidak balance, Kurangnya Pengetahuan akan Program Komputer. Sebagian Pegawai Muda / Baru tidak mempunyai NPWP (sehingga menimbulkan perbedaan)

Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the procedure for calculating and withholding Income Tax (PPh) Article 21 on the income of Civil Servants (PNS) at the Food and Drug Supervisory Agency of Banjarmasin City.*

*The types of data obtained from this study are: Quantitative data is data in the form of numbers obtained at the Food and Drug Supervisory Agency of Banjarmasin City, in the form of a list of salaries for civil servants (PNS) and proof of withholding income tax article 21.*

*The results show that Article 21 Income Tax (PPh 21) is a type of tax imposed on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments received by employees, non-employees, former employees, severance pay recipients and so on. PTKP 2022 is still based on the Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.010/2016. Those who earn Rp. 4.5 million per month or less than that amount are not required to pay taxes and if they earn more than that, they are subject to PPh 21 tax. if you earn more than that, then you will be subject to a 21 pph tax. Many obstacles are faced. Treasurer of the Food and Drug Supervisory Agency, among others: The number of employees who are many, Sometimes also often meet the difference in keeping the books in other words not balance, Lack of Knowledge of Computer Programs. Some Young / New Employees do not have NPWP (thus making a difference)*

*Keywords: Income Tax (PPh) Article 21, Income of Civil Servants (PNS)*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACK .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Pajak .....	9
2.2. Fungsi Pajak dan Azas Pengenaan Pajak .....	11
2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	16
2.5. Unsur – Unsur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.6. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 .....	25
2.7. Hak – Hak Pemotongan Pajak.....	26
2.8. Kewajiban Pemotong Pajak PPh 21 .....	28
2.9. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	29
2.10. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>33</b>
3.1. Gambaran Umum Organisasi .....	33
3.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran .....	53

## DAFTAR TABEL



- 5.1. Tabel Pemotongan Pajak PPh 21 pada PNS BPOM Banjarmasin bulan maret ..... 41
- 5.2. Tabel Pemotongan Pajak PPh 21 pada PNS BPOM Banjarmasin Bulan Maret ..... 44